

BAB I

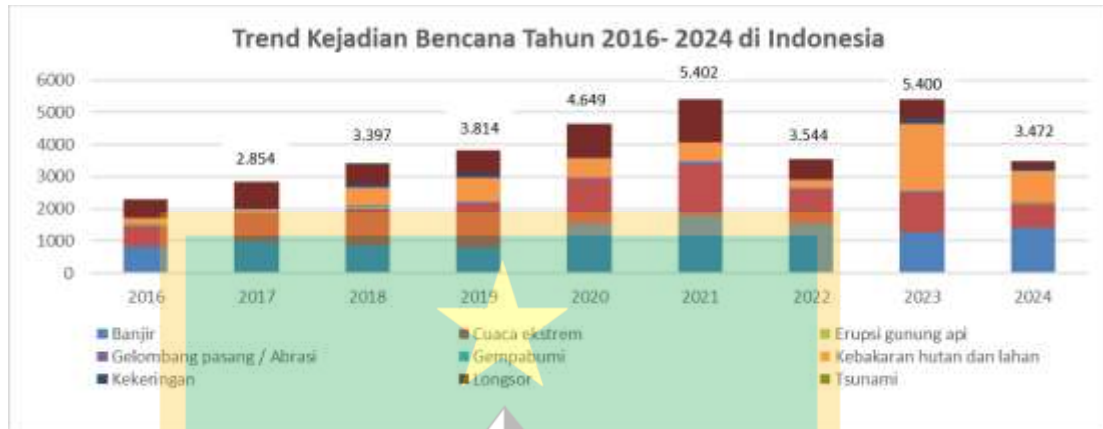
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aktivitas seismik di Indonesia meningkat karena negara ini berada di persimpangan empat lempeng tektonik utama: lempeng Asia, Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Wilayah selatan dan timur Indonesia dicirikan oleh busur vulkanik yang membentang dari Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Busur ini dikelilingi oleh dataran rendah yang seringkali tertutupi oleh rawa-rawa dan pegunungan vulkanik tua. Letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor adalah kemungkinan akibat dari kondisi ini. Terdapat dua musim yang berbeda dalam iklim tropis Indonesia: panas dan basah. Pola cuaca ini, bersama dengan batuan yang kompleks secara fisik dan kimia serta topografi permukaan yang umumnya bervariasi, menyediakan lingkungan yang ideal untuk kesuburan tanah. Sejumlah bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan dapat menimbulkan dampak negatif. Proses alam, seperti perubahan pola cuaca, kenaikan suhu global, pergerakan lempeng tektonik, dan letusan gunung berapi, merupakan kontributor utama terhadap peningkatan frekuensi dan keparahan bencana alam yang mengkhawatirkan. Selain itu, tindakan manusia, seperti pembangunan tanpa mempertimbangkan pengurangan risiko bencana, konversi lahan, dan pengabaian individu terhadap isu lingkungan dalam kehidupan sehari-hari mereka, berkontribusi secara substansial terhadap peningkatan frekuensi bencana.

Menurut statistik yang dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana hidrometeorologi mencakup sebagian besar bencana setiap tahun karena korelasinya yang kuat dengan variabel iklim dan cuaca. Kemungkinan akan terjadi peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi dari tahun 2016–2025, dengan 5.402 kejadian pada tahun 2021 sebagai tahun puncaknya. Seringkali, bencana hidrometeorologi dipicu oleh perubahan iklim, cuaca ekstrem, perubahan tekanan udara yang tiba-tiba, kejadian El Niño dan La Nina, dan periode panjang tanpa hujan atau kekeringan. Pembangunan

berkelanjutan dan pertimbangan lingkungan sangat penting di wilayah yang rawan gempa bumi dan tsunami, termasuk Papua, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, pantai selatan Jawa, dan pantai barat Sumatra..



Gambar 1. 1 Tren Kejadian Bencana tahun 2016-2024 di Indonesia

Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2024

Kejadian bencana yang menimbulkan dampak yang cukup besar yaitu kejadian Bencana alam tsunami Selat Sunda di Provinsi Lampung dan Provinsi Banten yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2018. Kejadian bencana tersebut mengakibatkan 5 Kabupaten terdampak yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Pesawaran. Tsunami tersebut berdampak buruk di Kabupaten Pandeglang, antara lain. Terdapat 296 korban jiwa, 3 orang masih hilang, 675 luka-luka, 3.553 pengungsi, dan rumah tinggal, infrastruktur, serta layanan publik dan sosial mengalami kerusakan berat, sedang hingga ringan akibat bencana ini. Kabupaten Pandeglang memiliki skor risiko bencana yang tinggi yaitu 192,52 untuk bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan tornado, menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (BNPB 2024).

Dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kabupaten Pandeglang (BPBD Kabupaten Pandeglang, 2020), menyatakan bahwa seluruh kerusakan dan kerugian akibat tsunami mencapai Rp 260.068.971.673 sebagaimana tercantum pada halaman 3 (tiga) :

Tabel 1. 1 Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami

No	Sektor	Kerusakan (Rp.)	Kerugian (Rp.)	Kebutuhan (Rp.)
1.	Permukiman	27.446.400.000	29.284.303.000	102.677.072.000
2.	Infrastruktur	8.891.847.303	26.022.785.000	108.655.779.017
3.	Sosial	14.322.652.200	34.565.000	1.410.304.000
4.	Ekonomi	42.335.899.130	110.624.203.000	113.504.121.808
5.	Lintas Sektor	385.871.040	720.446.000	23.163.495.000
	Total	93.382.669.673	166.686.302.000	349.410.771.825

(Sumber: Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami selat Sunda Kabupaten Pandeglang Tahun 2019-2020)

Kejadian bencana di Kabupaten Pandeglang menjadi Proyek Prioritas Strategis (major project) Bappenas tahun 2019-2024 untuk dilaksanakan oleh K/L khususnya kegiatan pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, mengingat kejadian bencana yang berdampak cukup besar dan Kabupaten Pandeglang merupakan daerah dengan indeks rawan bencana skala tinggi perlu dilakukan penelitian di Kabupaten Pandeglang.

Kondisi pascabencana menggambarkan bagaimana suatu wilayah berada dalam hal pemulihan setelah bencana. Situasi ini menuntut pemeriksaan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam upaya mereka untuk mengembalikan masyarakat ke keadaan sebelum bencana. Bidang-bidang berikut diperiksa dalam konteks pascabencana ini: (i) penanganan korban (pengungsi); (ii) pemulihan mata pencaharian; (iii) pembangunan infrastruktur; (iv) penyediaan konseling trauma; (v) perumusan langkah-langkah pencegahan di masa mendatang; (vi) pembentukan kerangka kerja kelembagaan; dan (viii) partisipasi dalam inisiatif pemulihan sosial-ekonomi, seperti pengenalan program pendampingan dan pembinaan, dengan tujuan meningkatkan kebangkitan dan/atau ketahanan sosial-ekonomi masyarakat yang terkena bencana. Pelaksanaan langkah-langkah mitigasi oleh Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah didasarkan pada keberadaan kebijakan yang ditujukan untuk manajemen bencana. Oleh karena itu, pedoman yang mengatur fungsi dan peran

berbagai pihak terkait dalam manajemen bencana secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif ditekankan baik oleh penerbitan undang-undang dan peraturan tentang bencana oleh pemerintah maupun pengalaman menangani bencana besar yang telah terjadi. Semua segmen masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana, berpartisipasi dalam inisiatif manajemen bencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pembangunan kembali dan rehabilitasi merupakan bagian dari manajemen bencana pasca-bencana. Rekonstruksi mencakup perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, sedangkan rehabilitasi berfokus pada pemulihan aspek sosial ekonomi dan budaya. Sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, "Kegiatan pemulihan sosial ekonomi dan budaya yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana dalam memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka ke tingkat sebelum bencana". Melalui pelatihan, konseling, dan bantuan stimulasi kegiatan ekonomi, upaya-upaya ini mendukung masyarakat dalam menghidupkan kembali dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Tujuan rekonstruksi adalah untuk memulihkan keadaan normal dan meningkatkan kehidupan masyarakat melalui peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa contoh peningkatan ini termasuk membantu penduduk yang terdampak bencana untuk memperoleh keterampilan baru, memberikan lebih banyak wewenang kepada kelompok usaha patungan, memfasilitasi distribusi pasokan dan produk, serta mendorong peluncuran usaha baru yang sukses.

Lembaga dan institusi yang terkait dengan BNPB dan BPBD melaksanakan upaya pemulihan dan peningkatan di bidang sosial ekonomi, budaya, dan pembangunan kembali. Pemulihan pascabencana merupakan suatu proses pembangunan kembali, dan pemulihan lingkungan fisik, ekonomi, sosial, ekonomi dan lingkungan memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk menanganinya serta aspek efektivitas program. Keterbatasan kapasitas masyarakat dan atau pelaksana program penanggulangan bencana serta masyarakat terdampak dapat berpengaruh terhadap implementasi program pemulihan pascabencana yang mempunyai prinsip "membangun lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan (build back better, safer and sustainable)." Keberhasilan upaya dan persiapan

pembangunan di masa depan bergantung pada pelaksanaan program yang efisien, yang pada gilirannya mempengaruhi kelangsungan hidup komunitas secara keseluruhan. Pemerintah daerah akan menghadapi hambatan ekonomi yang signifikan saat mereka berupaya untuk menghidupkan kembali dan memulihkan ke tingkat sebelum bencana, di samping masalah sosial dan psikologis, seperti pengalaman traumatis para penyintas. Program rehabilitasi dapat gagal jika diimplementasikan secara tidak terorganisir dan tidak lengkap di berbagai sektor. Hal ini dapat menyebabkan inisiatif pemberdayaan masyarakat yang kurang ideal dan tingkat keterlibatan aktif masyarakat yang rendah.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007. Sebagaimana Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa “penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi program rehabilitasi dan rekonstruksi”. Selanjutnya dalam Pasal 58 dan 59 (UU No 24 Tahun 2007) dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi salah satunya adalah “kegiatan pemulihan sosial ekonomi budaya sedangkan dalam rekonstruksi disebutkan kegiatan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya”. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), harus dilakukan bantuan kepada masyarakat untuk menghidupkan kembali dan mengaktifkan kegiatan tersebut melalui pelatihan, advokasi, dan layanan konseling, serta dengan memberikan stimulus kegiatan ekonomi. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2017 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana menetapkan bahwa pemulihan sosial-ekonomi dan budaya merupakan dua cara yang dilakukan daerah terdampak dalam Rehabilitasi Pasca Bencana. Komponen fisik dan non-fisik dari pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan sektor lintas sektor diperhitungkan ketika manajemen bencana dilaksanakan pada tahap rehabilitasi dan pembangunan kembali. Tujuannya adalah untuk memberdayakan kearifan lokal agar dapat membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan lebih berkelanjutan

berdasarkan pengurangan risiko bencana. Selama ini konsep yang dibangun lebih mempertimbangkan aspek fisik saja, untuk itu perlu dioptimalkan aspek non fisik pada sektor sosial, ekonomi, dan lintas sektor dengan menjelaskan kegiatan, pendanaan, waktu pelaksanaan serta pemangku kepentingan yang terlibat.

Sesuai dengan ayat (a) Pasal 3, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertugas memberikan arahan dan pedoman untuk upaya penanggulangan bencana, termasuk rekonstruksi yang adil dan merata, rehabilitasi, penanganan keadaan darurat, dan pencegahan bencana, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019. Lebih lanjut, sesuai dengan ayat (b) Pasal 212, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan dan peningkatan sosial dan ekonomi, serta pemulihan dan peningkatan lingkungan. Tanggung jawab ini diuraikan dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 2019 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang mengatur organisasi dan prosedur kerja badan tersebut. Pada penanganan pasca bencana, pemerintah melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, salah satu bentuk kegiatannya adalah program pendampingan sosial ekonomi di wilayah bencana. Kegiatan pemulihan sektor sosial ekonomi ini meliputi kegiatan-kegiatan konstruksi dan non-konstruksi yang merupakan satu kesatuan pendekatan melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.

Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi bertujuan untuk membantu masyarakat pulih dari bencana melalui beberapa program, termasuk program dukungan sosial ekonomi pasca bencana. Masyarakat yang terdampak parah oleh bencana menjadi fokus upaya pemberdayaan masyarakat dalam program ini, yang bertujuan untuk membantu masyarakat bangkit kembali secara ekonomi dan sosial setelah tragedi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat korban bencana oleh bencana dengan menciptakan sumber pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Kegiatan ini dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk membantu masyarakat mencapai potensi mereka. Program pendampingan sosial ekonomi terdiri dari beberapa tahapan kegiatan dampingan yaitu tahap koordinasi, kajian kebutuhan

dan intervensi kegiatan, pembentukan kelompok, pemberian stimulan, bimbingan teknis dan perumusan keberlanjutan program.

Pelaksanaan program pendampingan sosial ekonomi pascabencana masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil pemantauan dan observasi yang dilakukan oleh Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi terhadap program pendampingan sosial ekonomi menunjukkan beberapa fenomena yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan. Pertama, dalam program pendampingan sosial ekonomi bahwa sebagian besar kelompok usaha masyarakat penerima manfaat program tidak berlanjut (vakum) setelah program pendampingan dari BNPB selesai. Kedua, Dalam upaya memulihkan dan meningkatkan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di daerah pascabencana, program bantuan sosial-ekonomi bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dan dukungan pemerintah daerah, badan penanggulangan bencana regional, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, keterlibatan dan dukungan program terhadap pemerintah daerah dan OPD masih kurang memadai, dan BPBD gagal memantau aktivitas secara aktif dan memfasilitasi keberlanjutan bisnis dan aktivitas lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan pemulihan sosial ekonomi pascabencana tsunami selat sunda, BNPB melakukan kegiatan pendampingan sosial ekonomi pada tahun 2020-2021 di Kabupaten Pandeglang telah menghasilkan kelompok pendampingan sosial ekonomi sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Kelompok Masyarakat Dampingan Hasil Kegiatan Pendampingan Sosial Ekonomi Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang

No.	Nama Kelompok	Lokasi	Jenis Usaha/Bidang
1.	Kerajinan tangan dari Kayu Jati dan Mahoni	Desa Mekarmaya Kec. Panimbang	Handycraft
2.	Abon Ikan Tuna dan nugget ikan tenggiri	Desa Mekarmaya Kec Panimbang	Kuliner Bahari
3.	Sumur United	Desa Sumber Jaya Kec. Sumur	Olah Raga
4.	Sumberjaya Bahari Volley	Desa Sumber Jaya Kec. Sumur	Olah Raga

5.	Majelis Nurul Iman	Desa Sumber Jaya Kec. Sumur	Keagamaan
6.	Majelis Hidayatul Muftadiin	Desa Sumber Jaya Kec. Sumur	Keagamaan
7.	Majelis Anak-anak Daarul Muttaqin	Desa Sumber Jaya Kec. Sumur	Keagamaan
8.	Majelis Anak-anak Raoudotul Qur'an	Desa Sumber Jaya Kec. Sumur	Keagamaan
9	Karang Taruna Bahari	Desa Sumber Jaya Kec. Sumur	Kepemudaan

(Sumber : Data Arsip Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA Tahun 2020-2021)

Berdasarkan hasil laporan pembinaan pendampingan ekonomi yang dilaksanakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan ekonomi yang telah dilakukan belum berhasil dalam keberlanjutan usaha, antara lain disebabkan oleh kesulitan dengan pengadaan bahan baku, perlunya peningkatan kapasitas, beberapa anggota kelompok tidak terlibat aktif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengetahui bagaimana efektivitas program pendampingan sosial ekonomi di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan melihat pelaksanaannya serta faktor pendukung dan penghambat efektivitas program pendampingan sosial ekonomi di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini diharapkan akan menjadi rekomendasi bagi perbaikan program.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka berikut ini identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Beberapa kelompok masyarakat hasil pendampingan vakum (tidak aktif menjalankan usahanya) dalam keberlanjutan usaha/kegiatan setelah program pendampingan selesai.
2. Keterlibatan dan dukungan pemerintah daerah dan OPD belum optimal dalam program bantuan sosial-ekonomi, dan BPBD tidak secara aktif memantau kegiatan atau mendukung keberlanjutan bisnis, yang merupakan

salah satu tujuan program. Hal ini sebagai upaya untuk memulihkan dan meningkatkan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat di daerah yang terkena bencana. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dan dukungan lembaga penanggulangan bencana daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Dampak program pendampingan sosial ekonomi di Kabupaten Pandeglang belum maksimal mencapai tujuan program yang telah ditetapkan dengan adanya berbagai faktor pendukung dan penghambat program.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian yang dilakukan agar sesuai dengan tujuan penulisan, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pandeglang dengan sasaran kelompok pendampingan sosial dan ekonomi yang terbentuk pada tahun 2020 dan 2021.
2. Penelitian dilakukan dalam rangka melihat efektivitas program pendampingan sosial dan ekonomi di Kab Pandeglang dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat program .

1.4. Perumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas program pendampingan sosial ekonomi di Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat program pendampingan sosial ekonomi dalam upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang.

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka berikut ini tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas program pendampingan sosial ekonomi pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas program pendampingan sosial ekonomi dalam upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian analisis program pendampingan sosial ekonomi dalam upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang ditinjau dari manfaat akademis dan manfaat praktis antara lain sebagai berikut :

1.6.1. Manfaat Akademis

Temuan studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi kemajuan penelitian administrasi publik, khususnya di bidang program pemulihan sosial-ekonomi pasca bencana. Di sini, tidak hanya informasi baru yang akan diperoleh dari temuan studi sebelumnya yang relevan, tetapi penelitian ini juga akan berfungsi sebagai sumber daya untuk studi masa depan tentang subjek yang sama.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca maupun para pemangku kepentingan sebagai rekomendasi atau bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemulihan pascabencana sektor sosial ekonomi ke depan dalam upaya mendorong pemulihan pascabencana di Indonesia.

1.7. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I adalah Pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Peneliti akan menganalisis mengenai efektivitas program pendampingan sosial ekonomi di Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan teori efektivitas. Diharapkan penulisan ini nantinya mampu memberikan wawasan, pengetahuan dan pengembangan pada studi efektivitas program, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan tema ini

Bab II merupakan tinjauan pustaka, yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain studi terdahulu, uraian tentang konsep-konsep dan teori efektivitas, program, manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi, pemberdayaan masyarakat serta kerangka pemikiran. Konsep dan teori efektivitas program yang menjadi kata kunci dalam penelitian. Konsep manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Konsep dan teori tersebut akan digunakan penulis untuk membantu

menemukan pemahaman umum mengenai hal-hal yang terkait dengan topik penelitian yang diangkat sekaligus sebagai landasan berpikir dalam menganalisis efektivitas program pemulihan pascabencana melalui program pendampingan sosial ekonomi di Kabupaten Pandeglang

Bab selanjutnya yaitu Bab III Metodologi Penelitian yang menjelaskan tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, informan penelitian, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan Hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, dan hasil penelitian serta pembahasan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan.

Bab V merupakan kesimpulan hasil penelitian dan saran. Kesimpulan memberikan jawaban atas rumusan permasalahan. Saran memberikan rekomendasi kepada instansi terkait dengan hasil penelitian tesis ini.

